

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SOLOK MENURUT PENGELUARAN

2013-2017



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SOLOK
MENURUT PENGELUARAN**

2013-2017



**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok
Menurut Pengeluaran
2013-2017**

ISBN : 978-602-1057-83-4
Nomor Publikasi : 13030.1802
Katalog : 9302020.1303
Jumlah Halaman : x + 71 halaman
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Naskah :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS Kabupaten Solok

Gambar Kulit :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, BPS Kabupaten Solok

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok

Dicetak Oleh:

CV.Demy

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor serta keperluan lainnya.

Menurut teori ekonomi makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: Pendekatan Produksi, Pendekatan Pengeluaran/*expenditure*) serta Pendekatan Pendapatan. Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor, Impor, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh anggota tim yang telah menyusun dan menerbitkan publikasi ini pada waktunya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data yang diperlukan dalam publikasi ini. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Saran dan kritikan yang konstruktif sangat diharapkan unruk perbaikan dalam penerbitan publikasi selanjutnya, terima kasih.

Kayu Aro, Agustus 2018
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SOLOK
K e p a l a



ARIUS JONNAIDI

<https://solokkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	3
1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB.....	6
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	11
2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)	13
2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)	15
2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P).....	17
2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB).....	19
2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI).....	21
2.6 EKSPOR-IMPOR.....	24
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SOLOK MENURUT PDRB PENGELUARAN 2013-2017.....	25
3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN	27
3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN.....	34
3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	35
3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT.....	38
3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah	39
3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	42

3.2.5. Perubahan Inventori.....	44
3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa	45
3.2.7. Impor Barang dan Jasa.....	46
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN SOLOK	49
4.1 PDRB (NOMINAL)	51
4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB	52
BAB V PENUTUP	53
LAMPIRAN	57
DAFTAR PUSTAKA.....	69

<https://solokkab.bps.go.id>

DARTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 :	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok, 2013-2017.....	28
Tabel 2 :	PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok, 2013-2017.....	29
Tabel 3 :	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok, 2013-2017.....	31
Tabel 4 :	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok, 2013-2017.....	33
Tabel 5 :	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok, 2012 - 2016....	34
Tabel 6 :	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga, Kabupaten solok, 2013-2017.....	36
Tabel 7 :	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kabupaten solok, 2013-2017 .	37
Tabel 8 :	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Kabupaten solok, 2013-2017.....	38
Tabel 9 :	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT, Kabupaten solok, 2013-2017.....	39
Tabel 10 :	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Kabupaten solok, 2013-2017.....	40
Tabel 11 :	Perkembangan dan Struktur PMTB, Kabupaten solok, 2013-2017.....	43
Tabel 12 :	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori, Kabupaten solok, 2013-2017	44
Tabel 13 :	Perkembangan Ekspor, Kabupaten solok, 2013-2017.....	45
Tabel 14 :	Perkembangan Impor, Kabupaten solok, 2013-2017	47
Tabel 15 :	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita, Kabupaten solok, 2013-2017.....	51
Tabel 16 :	Proporsi Total Pengeluaran Akhir terhadap PDRB, Kabupaten solok, 2013-2017	52

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 : PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok 2013-2017.....	28
Gambar 2 : PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok 2013-2017.....	30
Gambar 3: Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok 2013-2017.....	30
Gambar 4: Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok 2013-2017.....	32
Gambar 5: Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok 2013-2017.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 :	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok, 2011-2017	59
Lampiran 2 :	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok, 2011-2017	60
Lampiran 3 :	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok, 2011-2017	61
Lampiran 4 :	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok, 2011-2017	62
Lampiran 5 :	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok, 2011-2017	63
Lampiran 6 :	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok, 2011-2017	64
Lampiran 7 :	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok, 2011-2017	65
Lampiran 8 :	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok, 2011-2017	66
Lampiran 9 :	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok, 2011-2017	67
Lampiran 10 :	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten solok , 2011-2017	68

<https://solokkab.bps.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN



Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010

Pembentukan Modal
Tetap Bruto

Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga

Perubahan Inventori

Pengeluaran Konsumsi
LNPRT

Ekspor

Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah

Impor

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk penyajian data ekonomi suatu wilayah, di samping PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat dimaksud, tidak dapat dilepaskan dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA



Sumber Data PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritorial suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\begin{aligned} \text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = & \text{Output} - \\ & \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ & \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ & \text{Output Bank Indonesia} \end{aligned}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan

penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-deflate PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih

dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan

gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalan BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjenk Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume nventori (t) - Volume inventori (t-1)) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) -
Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Import dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN MENURUT PDRB PENGELUARAN 2013-2017



<https://solokkab.bps.go.id>



3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sejak tahun 2015, Perhitungan PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, yaitu tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (SNA) yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melambat, perekonomian Kabupaten Solok periode 2013 - 2017 masih dapat tetap tumbuh di atas 5%, yakni sebesar 5,63%; 5,79%; 5,44%; 5,31%; dan 5,33%. Fluktuasi volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang dua tahun terakhir selalu tumbuh di atas 9% per tahunnya. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok sebesar 5,18% didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

Pada periode tahun 2013 - 2017, PDRB Kabupaten Solok atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 8.500,43 miliar rupiah (2013) menjadi 11.949,12 miliar rupiah (2017). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Solok pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 1 dan gambar 1 berikut ini:

**Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Solok
2013 - 2017**

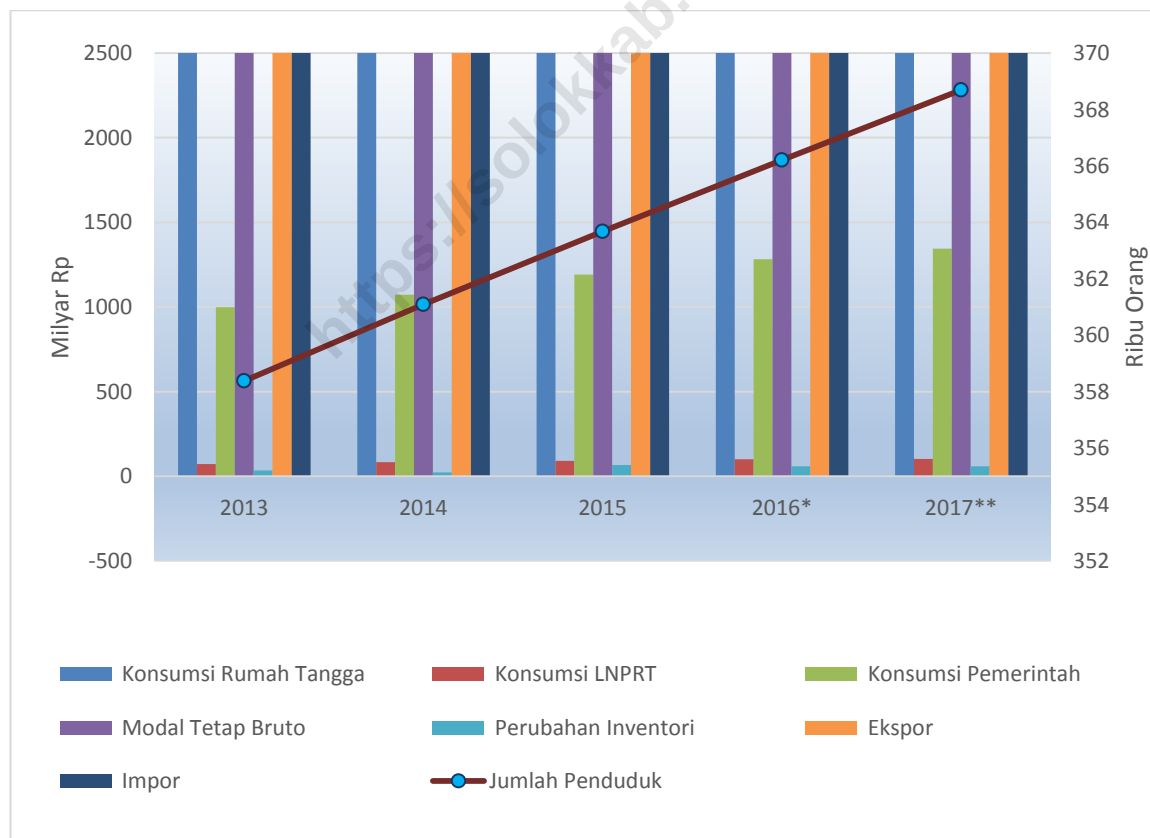
(Milyar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.729,60	5.181,74	5.691,33	6.146,10	6.670,62
2. Konsumsi LNPR	71,37	83,29	90,88	99,18	102,10
3. Konsumsi Pemerintah	998,82	1.071,54	1.190,69	1.282,82	1.345,21
4. PMTB	2.593,65	2.914,86	3.268,84	3.525,58	3.770,63
5. Perubahan Inventori	33,59	23,21	66,57	58,36	57,79
6. Ekspor	4.522,80	8.474,69	8.151,14	8.184,55	9.282,30
7. Impor	4.449,41	8.341,27	8.295,17	8.245,05	9.279,53
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + (6 - 7))	8.500,43	9.408,06	10.165,29	11.053,53	11.949,12

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Gambar 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Solok
2013 - 2017**



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan tahun 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Solok pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 2 dan gambar 2.

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Solok meningkat, yakni sebesar 7.245,94 miliar rupiah (2013) meningkat menjadi 8.965,65 miliar rupiah (2017). Sedangkan dari gambar 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok cenderung melambat, yakni dari 5,63 persen pada tahun 2013 menjadi 5,33 persen pada tahun 2017.

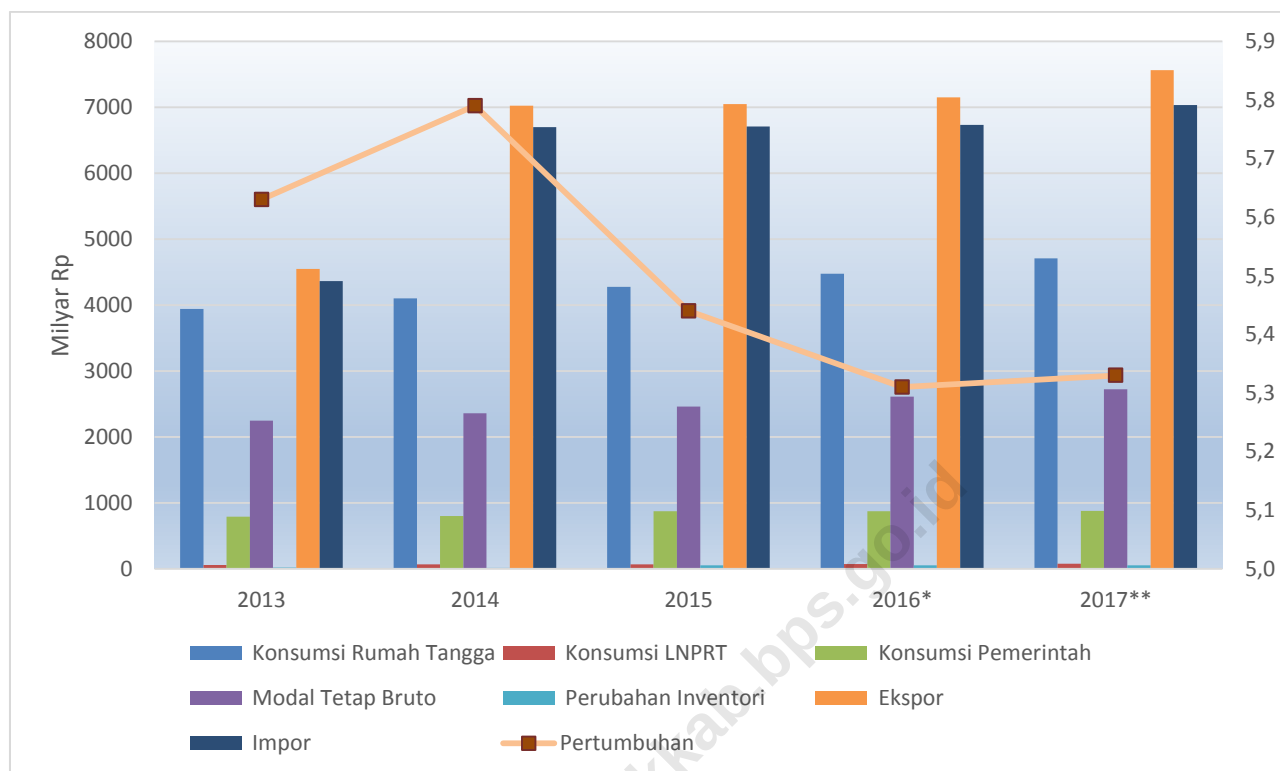
**Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Solok
2013 - 2017**

<i>(Milyar Rp)</i>					
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.942,52	4.100,09	4.277,66	4.475,59	4.707,63
2. Konsumsi LNPRT	60,70	68,50	71,12	74,30	77,45
3. Konsumsi Pemerintah	794,27	801,43	872,59	876,98	877,50
4. PMTB	2.246,37	2.358,54	2.461,93	2.611,71	2.721,15
5. Perubahan Inventori	19,51	14,58	56,62	55,77	55,88
6. Ekspor	4.548,56	7.020,66	7.049,01	7.148,39	7.560,70
7. Impor	4.366,00	6.698,31	6.706,35	6.731,09	7.034,66
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + (6 - 7))	7.245,94	7.665,50	8.082,58	8.511,65	8.965,65

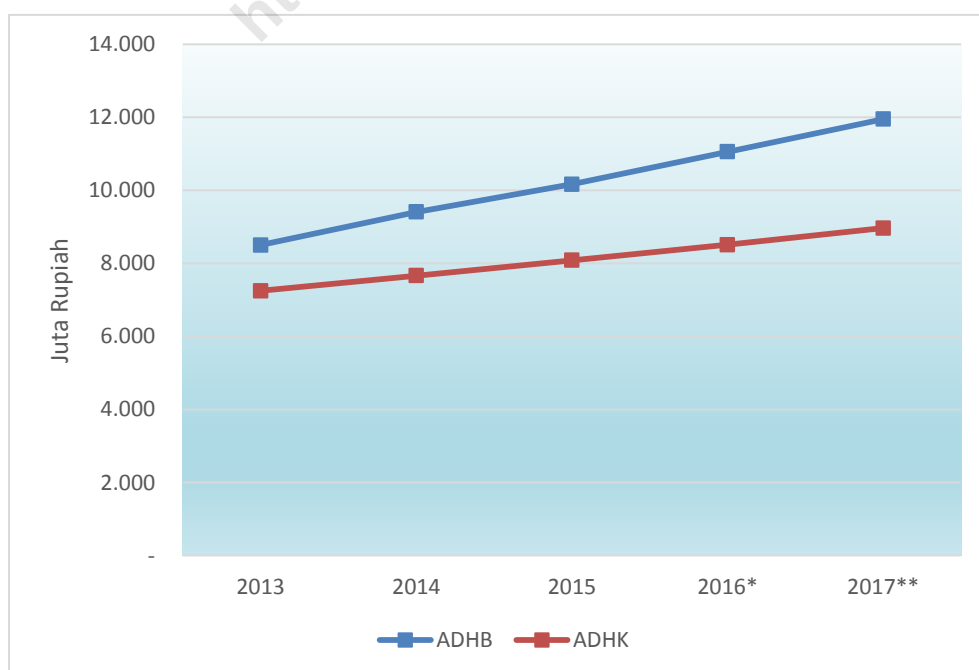
* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Gambar 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Solok
2013 - 2017**



**Gambar 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Solok
2013-2017**



Dari gambar 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Solok 2013 - 2017

	(%)				
Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	55,64	55,08	55,99	55,60	55,83
2. Konsumsi LNPRT	0,84	0,89	0,89	0,90	0,85
3. Konsumsi Pemerintah	11,75	11,39	11,71	11,61	11,26
4. PMTB	30,51	30,98	32,17	31,91	31,56
5. Perubahan Inventori	0,40	0,25	0,65	0,53	0,48
6. Ekspor	53,21	90,08	80,19	74,04	77,68
7. Impor	52,34	88,66	81,60	74,59	77,66
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + (6 - 7))	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

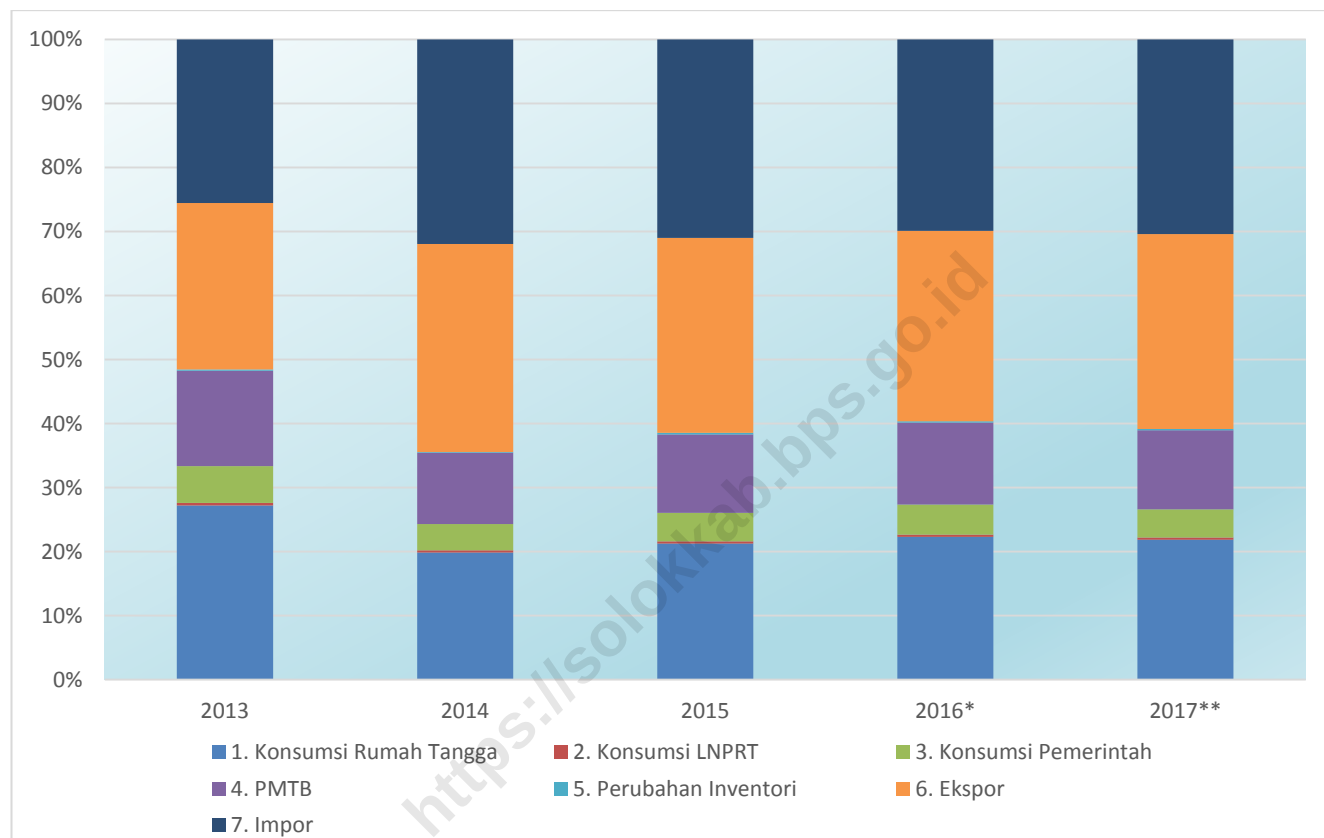
** Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2013-2017, PDRB Kabupaten Solok sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), yakni sekitar 55 Persen. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni 30,51 s.d 32,17 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada sekitar 11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 53,21 s.d 90,08 persen, tetapi di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 52,34 s.d 88,66 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan ekspor yang cenderung lebih tinggi dari impor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “surplus” atau menguntungkan.

**Gambar 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Solok, 2013 - 2017**



Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2013 - 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok berfluktuasi, yakni dari 5,63 persen (2013); 5,79 persen (2014); 5,44 persen (2015); dan 5,31 persen (2016) dan 5,33 persen (2017). Dari gambar 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Solok, 2013 - 2017**

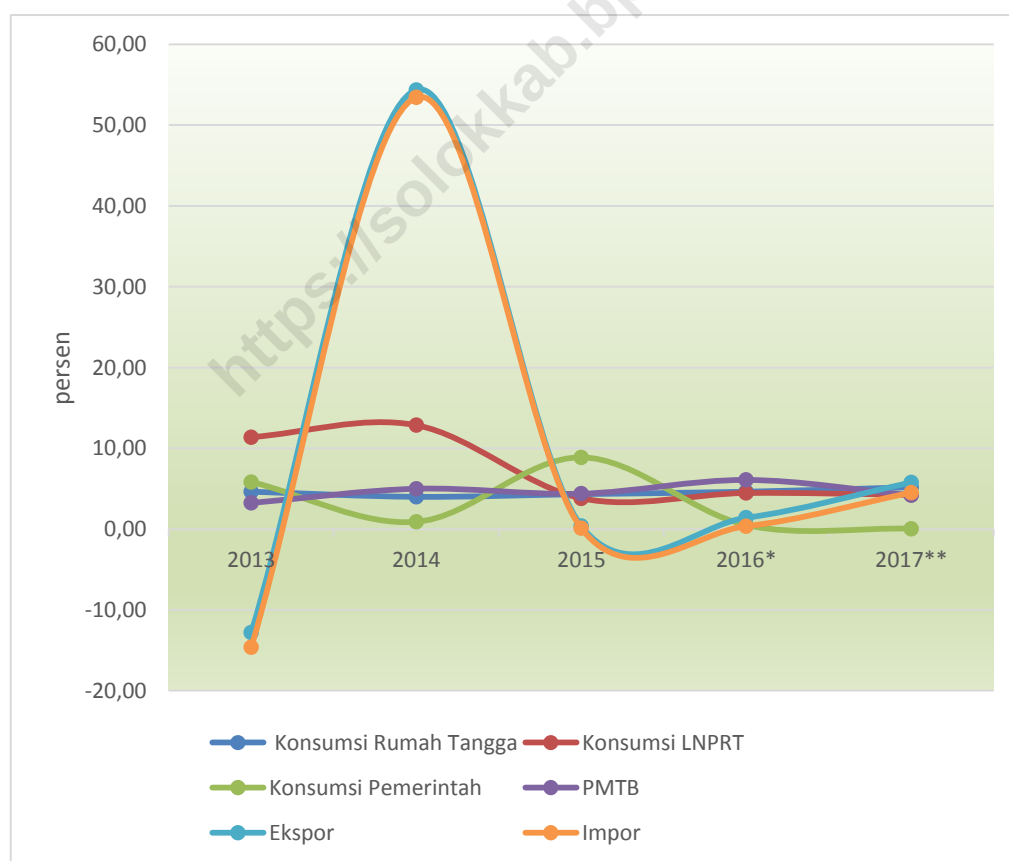
(%)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,63	4,00	4,33	4,63	5,18
2. Konsumsi LNPR	11,39	12,86	3,82	4,47	4,25
3. Konsumsi Pemerintah	5,83	0,90	8,88	0,50	0,06
4. PMTB	3,24	4,99	4,38	6,08	4,19
5. Perubahan Inventori	140,60	(25,28)	288,33	(1,50)	0,20
6. Ekspor	(12,79)	54,35	0,40	1,41	5,77
7. Impor	(14,61)	53,42	0,12	0,37	4,51
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + (6 - 7))	5,63	5,79	5,44	5,31	5,33

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Gambar 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Solok 2013 - 2017**



Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2013 – 2017, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Solok
2013 – 2017**

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	119,96	126,38	133,05	137,32	141,70
2. Konsumsi LNPRRT	117,58	121,58	127,79	133,49	131,82
3. Konsumsi Pemerintah	125,75	133,70	136,46	146,28	153,30
4. PMTB	115,46	123,59	132,82	135,07	138,57
5. Perubahan Inventori	172,16	159,22	117,57	104,64	103,41
6. Ekspor	99,43	120,71	115,64	114,49	122,77
7. Impor	101,91	124,53	123,69	122,49	131,91
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + (6 - 7))	117,31	122,73	125,77	129,86	133,28

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Solok untuk periode 2013 – 2017.

⁶ Indeks perkembangan

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Solok, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Solok maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu (1) kelompok makanan dan minuman selain restoran; (2) pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; (3) perumahan dan perlengkapan rumah tangga; (4) kesehatan dan pendidikan; (5) angkutan dan komunikasi; (6) restoran dan hotel; dan (7) kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2013 – 2017, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2013 – 2017 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB fluktuatif, yaitu 55,64 persen (2013); 55,08 persen (2014); 55,99 persen (2015); 55,60 persen (2016); dan 55,83 persen (2017). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 55,99 persen dan terendah pada tahun 2014 sebesar 55,08 persen. Hal ini terjadi karena pada tahun 2014 terjadi pergantian pemerintahan.

**Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Solok
2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	4.729,60	5.181,74	5.691,33	6.146,10	6.670,62
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	3.942,52	4.100,09	4.277,66	4.475,59	4.707,63
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	55,64	55,08	55,99	55,60	55,83
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/ tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	55.792,71	60.666,93	66.190,57	70.986,69	76.526,89
b. ADHK 2010	46.507,92	48.003,15	49.749,47	51.692,53	54.006,99
Rata-rata konsumsi per- kapita/ tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	13.197,06	14.350,09	15.649,11	16.782,85	18.092,66
b. ADHK 2010	11.000,87	11.354,61	11.762,02	12.221,28	12.768,46
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT	4,63	4,00	4,33	4,63	5,18
b. Per-RT	3,83	3,21	3,64	3,91	4,48
c. Per kapita	3,83	3,22	3,59	3,90	4,48
Jumlah RT (<i>unit</i>)	84.771	85.413	85.984	86.581	87.167
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	358.383	361.095	363.684	366.213	368.692

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013, setiap rumah tangga di Kabupaten Solok menghabiskan dana sekitar 55,79 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 76,53 juta rupiah (2017). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh pada kisaran 3 s.d 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,48 persen dan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 3,21 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk

peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 3,22 s.d. 4,48 persen, yakni 3,82 persen (2013); 3,22 persen (2014); 3,59 persen (2015); 3,90 persen (2016); dan 4,48 persen (2017).

Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang berada pada 0,70 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Solok
2013 – 2017**

					(%)
Komponen Konsumsi	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	27,84	26,82	27,04	26,83	26,81
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,14	2,13	2,13	2,11	2,11
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,17	5,47	5,47	5,34	5,38
d. Kesehatan & Pendidikan	4,18	4,23	4,40	4,56	4,60
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,55	10,66	11,00	10,93	11,08
f. Hotel & Restoran	2,05	2,10	2,13	2,16	2,17
g. Lainnya	3,71	3,66	3,81	3,68	3,68
Total Konsumsi	55,64	55,08	55,99	55,60	55,83

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2013 distribusi komponen konsumsi rumah tangga sebesar 55,64 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 55,08 persen (2014); 55,99 persen (2015); 55,60 persen (2016); dan 55,83 persen (2017). Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 8, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 5,35 persen.

Tabel 8. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Solok 2013 – 2017⁷

(%)					
Komponen Konsumsi	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,31	5,35	5,28	3,21	3,18
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,22	3,40	5,11	4,46	-1,25
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,19	6,32	2,06	7,20	4,80
d. Kesehatan & Pendidikan	3,54	7,04	7,47	1,70	2,59
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	30,53	-7,51	-26,16	-11,00	-1,17
f. Hotel & Restoran	-0,73	21,40	-4,20	-0,99	7,23
g. Lainnya	-0,41	22,19	-0,67	-0,97	7,69
Total Konsumsi	5,35	4,62	2,47	3,26	2,63

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Pada Tabel 9, dapat dilihat total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2013 konsumsi LNPRT sebesar 71,37 miliar rupiah, meningkat menjadi 102,10 miliar rupiah (2017). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 berturut-turut adalah 11,39 persen (2013), 12,86 persen (2014), 3,82 persen (2015); 4,47 persen (2016); dan 4,25 persen (2017). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2015.

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

**Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPR
Kabupaten Solok
2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Konsumsi LNPR					
a. ADHB (Miliar Rp)	71,37	83,29	90,88	99,18	102,10
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	60,70	68,50	71,12	74,30	77,45
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,84	0,89	0,89	0,90	0,85
Pertumbuhan (% ADHK)	11,39	12,86	3,82	4,47	4,25

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Kabupaten Solok
2013 - 2017**

U r a i a n	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	998,82	1.071,54	1.190,70	1.282,82	1.345,21
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	794,27	801,43	872,59	876,98	877,50
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	11,75	11,39	11,71	11,61	11,26
Rata-rata konsumsi per- kapita/ tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	2.787,01	2.967,46	3.273,99	3.502,94	3.648,61
b. ADHK 2010	2.216,26	2.219,44	2.399,31	2.394,73	2.380,03
Rata-rata konsumsi per- pegawai/ tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	131.717,83	139.668,40	154.455,37	186.782,48	199.794,00
b. ADHK 2010	104.743,29	104.461,64	113.191,34	127.691,14	130.328,05
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi Pemerintah	5,83	0,90	8,88	0,50	0,06
b. Perkapita	5,01	0,14	8,10	(0,19)	(0,61)
c. Per-pegawai	9,88	(0,27)	8,36	12,81	2,07
Jumlah pegawai pemerintah (<i>unit</i>)	7.583	7.672	7.709	6.868	6.733
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	358.383	361.095	363.684	366.213	368.692
	358,38	361,10	363,68	366,21	368,69

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 998,82 miliar rupiah, meningkat menjadi 1.345,21 miliar rupiah (2017). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami fluktuasi tapi cenderung menurun, dari 11,75 persen (tahun 2013) hingga mencapai 11,26 persen (tahun 2017). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 11,26 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2013 sebesar 11,75 persen.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 2,79 juta rupiah, terus meningkat menjadi 3,65 juta rupiah pada tahun 2017.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2013-2015, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2016-2017. Pada tahun 2016, konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan adalah senilai 2,39 juta rupiah, turun menjadi 2,38 juta rupiah (2017). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2015, terdapat peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,01 persen (2013) meningkat menjadi 8,10 persen (2015). Akan tetapi, untuk tahun 2016 menunjukkan terdapat penurunan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas yang jumlahnya tidak terlalu besar, yakni turun sebesar 4,58 ribu rupiah dengan laju pertumbuhan per kapita minus 0,19 persen. Kemudian, pada tahun 2017, turun lagi sebesar 14,70 ribu rupiah dengan laju pertumbuhan perkapita minus 0,61 persen. Penurunan konsumsi pemerintah per kapita dan laju pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun 2016 dan 2017 terjadi karena adanya pemotongan anggaran pemerintah pada tahun tersebut yang berkebalikan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 131,72 juta rupiah meningkat menjadi 199,79 juta rupiah (2017).

Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan konsumsi per pegawai dimana kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2013 dan 2016, masing-masing sebesar 9,88 persen dan 12,81 persen. Peningkatan yang tajam terjadi pada tahun 2016 karena jumlah pegawai pemerintah yang juga berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Pengurangan jumlah pegawai ini terjadi karena ditutupnya penerimaan calon pegawai negeri sipil (cpns) baru atau yang lebih dikenal dengan *moratorium* sehingga pegawai yang pensiun atau tidak lagi bekerja tidak digantikan dengan pegawai baru.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010), tetapi tidak sejalan juga jumlah pegawai pemerintah yang mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2017. Pada periode tahun 2013 s.d 2015 jumlah pegawai pemerintah terus meningkat masing-masing tahun sebesar 7.583 orang (2013); 7.672 orang (2014); dan 7.709 orang (2015). Kemudian, pada tahun 2016 terjadi penurunan yang sangat tajam menjadi 6.868 orang atau berkurang 10,91 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Terakhir, pada tahun 2017, jumlah pegawai berkurang 1,97 persen menjadi 6.733 orang.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2015, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 5,83 persen dan 8,88 persen; untuk konsumsi per-kapita 5,01 persen dan 8,10 persen; dan untuk konsumsi per-pegawai 9,88 persen dan 8,36 persen.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁸. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (enam) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013 – 2017 naik dari 3,24 persen (2013) menjadi 4,19 persen (2017). Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun berfluktuatif tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen non bangunan.

Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2013-2017 pada rentang 3,15 s.d. 7,13 persen. Sedangkan pertumbuhan sektor Non Bangunan pada tahun 2013-2017 mengalami

⁸ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

fluktuasi, yaitu 0,48 persen (2013); 8,06 persen (2014); 1,98 persen (2015); 4,35 persen (2016); dan 1,18 persen (2017).

Tabel 11. Perkembangan dan Struktur PMTB, Kabupaten Solok, 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	2.593,65	2.914,86	3.269,84	3.527,58	3.770,63
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	2.246,37	2.358,54	2.461,93	2.611,71	2.721,15
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	30,51	30,98	32,17	31,91	31,56
Struktur PMTB					
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	1.644,27	1.788,54	2.012,11	2.181,28	2.359,89
(%)	63,40	61,36	61,54	61,83	62,59
b. Non Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	949,38	1.126,31	1.257,73	1.346,30	1.410,75
(%)	36,60	38,64	38,46	38,17	37,41
c. Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	2.593,65	2.914,86	3.269,84	3.527,58	3.770,63
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	4,97	3,15	5,90	7,13	5,97
b. Non Bangunan	0,48	8,06	1,98	4,35	1,18
c. Total PMTB	3,24	4,99	4,38	6,08	4,19

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan

pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Solok
2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	33,59	23,21	66,57	58,36	57,79
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	19,51	14,58	56,62	55,77	55,88
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,40	0,25	0,65	0,53	0,48

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Solok mengalami fluktuasi tapi cenderung menurun. Pada tahun 2013, proporsi perubahan inventori adalah 0,40 persen, selanjutnya 0,25 persen (2014); 0,65 persen (2015); 0,53 persen (2016); dan 0,48 persen (2017). Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 0,65 persen.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Solok, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 13. Perkembangan Ekspor
Kabupaten Solok
2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	4.522,80	8.474,69	8.151,14	8.184,55	9.282,30
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	4.548,56	7.020,66	7.049,01	7.148,39	7.560,70
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	53,21	90,08	80,19	74,04	77,68
Pertumbuhan (%)	-12,79	54,35	0,40	1,41	5,77

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2013-2017 nilai ekspor barang dan jasa Kabupaten Solok menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 4.522,80 miliar rupiah meningkat menjadi sebesar 9.282,30 miliar rupiah (2017). Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai “riil” pada tahun 2013 sebesar 4.548,56 miliar rupiah meningkat menjadi 7.860,70 miliar rupiah (2017). Sementara itu, pada periode 2013 s.d 2017, proporsi dalam PDRB berfluktuatif dan meningkat pada setahun terakhir, dari 53,21 persen pada tahun 2013 menjadi 77,68 persen di tahun 2017.

Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang tinggi, khususnya pada tahun 2014 dan 2017, dengan masing-masing tahun mencapai 54,35 persen dan 5,77 persen. Sementara itu, pada tahun lainnya, pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun adalah sebesar minus 12,79 persen (2013); 0,40 persen (2015); dan 1,41 persen (2016).

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Solok, sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Solok di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Solok terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Solok terjadi peningkatan (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2013 s.d 2017. Pada tahun 2013 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 4.449,41 miliar rupiah, meningkat menjadi 9.279,53 miliar rupiah pada tahun 2017. Jika dicermati, proporsi impor barang dan jasa pada tahun 2013-2017 terhadap PDRB Kabupaten Solok berfluktuasi. Pada tahun 2013, memberikan kontribusi sebesar 52,34 persen. Pada tahun berikutnya kontribusi impor barang dan jasa meningkat menjadi 88,66 persen. Selanjutnya, menurun menjadi 81,60 persen (2015), kemudian menurun lagi menjadi 74,59 persen (2016), terakhir, pada 2017, proporsi impor barang dan jasa meningkat menjadi 77,66 persen.

Tabel 14. Perkembangan Impor
Kabupaten Solok
2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	4.449,41	8.341,27	8.295,17	8.245,05	9.279,53
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	4.366,00	6.698,31	6.706,35	6.731,09	7.034,66
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	52,34	88,66	81,60	74,59	77,66
Pertumbuhan (%)	-14,61	53,42	0,12	0,37	4,51

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Solok, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

**Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Solok
2013 – 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
a. ADHB	8.500,43	9.408,06	10.165,29	11.053,53	11.949,12
b. ADHK 2010	7.245,94	7.665,50	8.082,58	8.511,65	8.965,65
PDRB per kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	23.718,83	26.054,24	27.950,90	30.183,34	32.409,49
b. ADHK 2010	20.218,43	21.228,48	22.224,19	23.242,36	24.317,46
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 (%)	4,81	5,00	4,69	4,58	4,63
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	358,38	361,10	363,68	366,21	368,69
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,78	0,76	0,72	0,70	0,68
Pertumbuhan (%)	5,63	5,79	5,44	5,31	5,33

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

PDRB per-kapita Kabupaten Solok menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 15), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Solok rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Sementara itu, pertumbuhan per-kapita secara “riil”

berfluktuasi di kisaran 4 s.d 5 persen. Pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif diikuti oleh angka pertumbuhan penduduk yang berfluktuatif pula pada kisaran 0,68 s.d. 0,78 persen.

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 16. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Solok 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	4.729,60	5.181,74	5.691,33	6.146,10	6.670,62
b. LNPRT	71,37	83,29	90,88	99,18	102,10
c. Pemerintah	998,82	1.071,54	1.190,70	1.282,82	1.345,21
Jumlah	5.799,79	6.336,57	6.972,91	7.528,10	8.117,94
PDRB ADHB (Miliar Rp)	8.500,43	9.408,06	10.165,29	11.053,53	11.949,12
Proporsi (%)	68,23	67,35	68,60	68,11	67,94

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Proporsi total pengeluaran konsumsi akhir terhadap PDRB Kabupaten Solok dari tahun 2013 s.d 2017 berfluktuasi dimana mengalami penurunan pada periode 2013-2014, yakni dari 68,23 persen (2013) menjadi 67,35 persen (2014). Kemudian meningkat lagi di tahun 2015 (68,60%), tetapi terus menurun hingga tahun 2017, masing-masing 68,11 persen (2016), dan 67,94 persen (2017).

BAB V

PENUTUP



Analisis PDRB Menurut Pengeluaran

Empat Pelaku Ekonomi Tingkat Akhir

01

Rumah
Tangga

02

LNPR

03

Pemerintah

04

Perusahaan

Perilaku Ekonomi

01

Konsumsi

02

Perdagangan
Luar Negeri

03

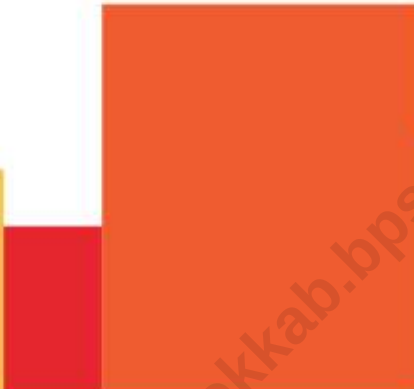
Perdagangan
Antar Daerah

04

Investasi

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 s.d 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Solok pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti jumlah penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 s.d 2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Nominal PDRB Kabupaten Solok Tahun 2017 atas dasar harga berlaku mencapai 11.949,12 miliar rupiah sementara atas dasar harga konstan sebesar 8.965,65 miliar rupiah. Peranan konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah mencapai 67,94 persen dimana 55,84 persen adalah konsumsi rumah tangga. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok tahun 2017 sebesar 5,33 persen
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Solok terhadap ekonomi luar daerah.

LAMPIRAN



Distribusi PDRB ADHK

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer tristique nisi nec nisi urna tristique. non luctus sem convallis. Pellentesque molestie porttitor justo, eget ornare molestie metus. ultrices ut.



Laju Pertumbuhan PDRB ADHB

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer tristique nisi nec nisi urna tristique. non luctus sem convallis. Pellentesque molestie porttitor justo, eget ornare molestie metus. ultrices ut.

Aliquam erat volutpat. In quis felis laoreet, rutrum felis non, dapibus libero. Phasellus eu quam eget, tempus faucibus in ornare porttitor adipiscing.



PDRB ADHB



Indeks Perkembangan PDRB ADHB

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer tristique nisi nec nisi urna tristique. non luctus sem convallis. Pellentesque molestie porttitor justo, eget ornare molestie metus. ultrices ut.



Distribusi PDRB ADHB



Laju Pertumbuhan PDRB ADHK

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer tristique nisi nec nisi urna tristique. non luctus sem convallis. Pellentesque molestie porttitor justo, eget ornare molestie metus. ultrices ut.

Aliquam erat volutpat. In quis felis laoreet, rutrum felis non, dapibus libero. Phasellus eu quam eget, tempus faucibus in ornare porttitor adipiscing.



PDRB ADHK

Indeks Perkembangan PDRB ADHK

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer tristique nisi nec nisi urna tristique. non luctus sem convallis. Pellentesque molestie porttitor justo, eget ornare molestie metus. ultrices ut.



Indeks Harga Implisit

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer tristique nisi nec nisi urna tristique. non luctus sem convallis. Pellentesque molestie porttitor justo, eget ornare molestie metus. ultrices ut.



Lampiran 1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Solok
2011 - 2017

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3 845 751,58	4 251 732,90	4 729 603,50	5 181 744,70	5 691 330,39	6 146 098,73	6 670 619,68
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1 947 366,11	2 146 519,45	2 366 562,41	2 523 466,44	2 748 765,68	2 965 554,57	3 203 054,20
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	149 726,25	160 625,99	182 051,21	200 767,99	216 169,13	232 830,66	251 928,50
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	343 782,75	376 457,66	439 586,31	514 754,08	556 254,22	589 741,05	642 564,73
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	276 693,15	316 961,52	354 967,41	397 864,67	447 446,63	504 520,16	549 801,18
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	745 652,40	818 473,14	896 858,42	1 003 056,50	1 118 289,12	1 208 509,86	1 323 810,36
1.f. Hotel dan Restoran	137 861,93	155 618,00	174 366,24	197 142,28	216 900,47	238 488,56	259 410,12
1.g. Lainnya	244 668,99	277 077,16	315 211,52	344 692,74	387 505,16	406 453,87	440 050,60
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	55 402,74	60 896,02	71 373,09	83 285,71	90 884,44	99 181,00	102 104,17
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	790 123,31	897 200,92	998 816,30	1 071 535,94	1 190 696,42	1 282 822,08	1 345 213,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 192 405,07	2 426 312,57	2 593 646,75	2 914 856,50	3 269 843,99	3 527 579,91	3 770 634,43
4.a. Bangunan	1 393 026,85	1 564 973,41	1 644 265,23	1 788 542,86	2 012 113,85	2 181 277,11	2 359 888,21
4.b. Non-Bangunan	799 378,21	861 339,16	949 381,52	1 126 313,64	1 257 730,14	1 346 302,79	1 410 746,22
5. Perubahan Inventori	24 604,10	10 695,41	33 590,17	23 213,80	66 567,18	58 355,03	57 785,34
6. Net Ekspor	- 38 433,52	- 7 584,62	73 396,54	133 418,96	- 144 028,70	- 60 504,80	2 762,12
6.a. Ekspor	4 830 081,55	5 224 679,31	4 522 802,62	8 474 685,87	8 151 137,33	8 184 549,71	9 282 296,28
6.b. Impor	4 868 515,07	5 232 263,94	4 449 406,09	8 341 266,92	8 295 166,03	8 245 054,51	9 279 534,16
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6 869 853,29	7 639 253,20	8 500 426,36	9 408 055,61	10 165 293,72	11 053 531,95	11 949 118,73

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Solok
2011 - 2017

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3 616 794,69	3 767 989,46	3 942 523,19	4 100 092,76	4 277 658,26	4 475 591,10	4 707 627,22
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1 820 159,64	1 880 423,89	1 944 788,57	2 003 389,30	2 088 725,54	2 177 851,07	2 285 916,92
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	134 436,71	138 220,21	146 906,66	151 577,62	157 393,53	165 364,70	175 239,11
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	324 902,01	339 146,58	370 366,94	405 124,41	422 183,38	437 907,28	455 364,83
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	261 212,87	272 229,06	283 350,41	293 118,00	302 791,20	320 296,91	337 826,32
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	713 818,78	748 310,81	780 890,06	815 249,47	853 037,83	904 232,85	964 529,40
1.f. Hotel dan Restoran	122 468,80	128 501,37	134 975,69	144 932,94	151 087,29	160 010,22	168 990,17
1.g. Lainnya	239 795,89	261 157,52	281 244,85	286 701,02	302 439,49	309 928,07	319 760,46
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	52 453,26	54 494,88	60 699,15	68 503,63	71 119,91	74 298,45	77 454,46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	723 551,57	750 499,31	794 268,34	801 429,68	872 592,05	876 982,73	877 498,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 079 566,05	2 175 904,90	2 246 373,73	2 358 543,70	2 461 929,64	2 611 707,54	2 721 151,30
4.a. Bangunan	1 292 794,24	1 336 682,64	1 403 138,37	1 447 307,11	1 532 685,91	1 642 033,55	1 740 029,09
4.b. Non-Bangunan	786 771,80	839 222,26	843 235,36	911 236,59	929 243,73	969 673,99	981 122,22
5. Perubahan Inventori	22 046,23	8 109,40	19 511,13	14 579,47	56 617,06	55 769,61	55 880,42
6. Net Ekspor	- 48 734,39	102 957,98	182 566,00	322 347,53	342 665,62	417 305,31	526 042,29
6.a. Ekspor	4 559 142,46	5 215 869,39	4 548 562,18	7 020 656,97	7 049 013,04	7 148 390,80	7 560 699,73
6.b. Impor	4 607 876,84	5 112 911,40	4 365 996,18	6 698 309,45	6 706 347,42	6 731 085,48	7 034 657,45
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6 445 677,42	6 859 955,93	7 245 941,54	7 665 496,76	8 082 582,54	8 511 654,75	8 965 654,44

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Solok
2011 - 2017

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	55,98	55,66	55,64	55,08	55,99	55,60	55,83
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	28,35	28,10	27,84	26,82	27,04	26,83	26,81
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,18	2,10	2,14	2,13	2,13	2,11	2,11
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,00	4,93	5,17	5,47	5,47	5,34	5,38
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,03	4,15	4,18	4,23	4,40	4,56	4,60
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,85	10,71	10,55	10,66	11,00	10,93	11,08
1.f. Hotel dan Restoran	2,01	2,04	2,05	2,10	2,13	2,16	2,17
1.g. Lainnya	3,56	3,63	3,71	3,66	3,81	3,68	3,68
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,81	0,80	0,84	0,89	0,89	0,90	0,85
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,50	11,74	11,75	11,39	11,71	11,61	11,26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,91	31,76	30,51	30,98	32,17	31,91	31,56
4.a. Bangunan	20,28	20,49	19,34	19,01	19,79	19,73	19,75
4.b. Non-Bangunan	11,64	11,28	11,17	11,97	12,37	12,18	11,81
5. Perubahan Inventori	0,36	0,14	0,40	0,25	0,65	0,53	0,48
6. Net Ekspor	-0,36	-0,10	0,86	1,42	-1,42	-0,55	0,02
6.a. Ekspor	70,31	68,39	53,21	90,08	80,19	74,04	77,68
6.b. Impor	70,87	68,49	52,34	88,66	81,60	74,59	77,66
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 4
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Solok
2011 - 2017

(Persen)							
Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	56,11	54,93	54,41	53,49	52,92	52,38	52,51
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	28,24	27,41	26,84	26,14	25,84	25,59	25,50
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,09	2,01	2,03	1,98	1,95	1,94	1,95
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,04	4,94	5,11	5,29	5,22	5,14	5,08
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,05	3,97	3,91	3,82	3,75	3,76	3,77
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	11,07	10,91	10,78	10,64	10,55	10,62	10,76
1.f. Hotel dan Restoran	1,90	1,87	1,86	1,89	1,87	1,88	1,88
1.g. Lainnya	3,72	3,81	3,88	3,74	3,74	3,64	3,57
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,81	0,79	0,84	0,89	0,88	0,87	0,86
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,23	10,94	10,96	10,46	10,80	10,30	9,79
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,26	31,72	31,00	30,77	30,46	30,68	30,35
4.a. Bangunan	20,06	19,49	19,36	18,88	18,96	19,29	19,41
4.b. Non-Bangunan	12,21	12,23	11,64	11,89	11,50	11,39	10,94
5. Perubahan Inventori	0,34	0,12	0,27	0,19	0,70	0,66	0,62
6. Net Ekspor	-0,76	1,50	2,52	4,21	4,24	4,90	5,87
6.a. Ekspor	70,73	76,03	62,77	91,59	87,21	83,98	84,33
6.b. Impor	71,49	74,53	60,25	87,38	82,97	79,08	78,46
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Solok
2011 - 2017

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10,23	10,56	11,24	9,56	9,83	7,99	8,53
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,07	10,23	10,25	6,63	8,93	7,89	8,01
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	11,47	7,28	13,34	10,28	7,67	7,71	8,20
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,92	9,50	16,77	17,10	8,06	6,02	8,96
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	8,94	14,55	11,99	12,08	12,46	12,76	8,98
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,80	9,77	9,58	11,84	11,49	8,07	9,54
1.f. Hotel dan Restoran	15,29	12,88	12,05	13,06	10,02	9,95	8,77
1.g. Lainnya	24,74	13,25	13,76	9,35	12,42	4,89	8,27
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	8,09	9,92	17,20	16,69	9,12	9,13	2,95
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,84	13,55	11,33	7,28	11,12	7,74	4,86
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15,47	10,67	6,90	12,38	12,18	7,88	6,89
4.a. Bangunan	13,99	12,34	5,07	8,77	12,50	8,41	8,19
4.b. Non-Bangunan	18,15	7,75	10,22	18,64	11,67	7,04	4,79
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-456,95	-80,27	-1.067,70	81,78	-207,95	-57,99	-104,57
6.a. Ekspor	17,11	8,17	-13,43	87,38	-3,82	0,41	13,41
6.b. Impor	18,35	7,47	-14,96	87,47	-0,55	-0,60	12,55
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	11,27	11,20	11,27	10,68	8,05	8,74	8,10

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 6
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Solok
2011 - 2017

(Persen)							
Komponen Pengeluaran/ <i>Type of Expenditure</i>	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,67	4,18	4,63	4,00	4,33	4,63	5,18
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,02	3,31	3,42	3,01	4,26	4,27	4,96
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	0,08	2,81	6,28	3,18	3,84	5,06	5,97
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,83	4,38	9,21	9,38	4,21	3,72	3,99
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,84	4,22	4,09	3,45	3,30	5,78	5,47
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,07	4,83	4,35	4,40	4,64	6,00	6,67
1.f. Hotel dan Restoran	2,42	4,93	5,04	7,38	4,25	5,91	5,61
1.g. Lainnya	22,26	8,91	7,69	1,94	5,49	2,48	3,17
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,33	3,89	11,39	12,86	3,82	4,47	4,25
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,50	3,72	5,83	0,90	8,88	0,50	0,06
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,53	4,63	3,24	4,99	4,38	6,08	4,19
4.a. Bangunan	5,79	3,39	4,97	3,15	5,90	7,13	5,97
4.b. Non-Bangunan	16,28	6,67	0,48	8,06	1,98	4,35	1,18
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Antar Daerah	-552,62	-311,26	77,32	76,56	6,30	21,78	26,06
6.a. Ekspor	10,54	14,40	-12,79	54,35	0,40	1,41	5,77
6.b. Impor	12,02	10,96	-14,61	53,42	0,12	0,37	4,51
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4,40	6,43	5,63	5,79	5,44	5,31	5,33

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 7
Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Solok
2011 - 2017

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	110,23	110,56	111,24	109,56	109,83	107,99	108,53
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	108,07	110,23	110,25	106,63	108,93	107,89	108,01
1.b. Pakaiian dan Alas Kaki	111,47	107,28	113,34	110,28	107,67	107,71	108,20
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	110,92	109,50	116,77	117,10	108,06	106,02	108,96
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	108,94	114,55	111,99	112,08	112,46	112,76	108,98
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	110,80	109,77	109,58	111,84	111,49	108,07	109,54
1.f. Hotel dan Restoran	115,29	112,88	112,05	113,06	110,02	109,95	108,77
1.g. Lainnya	124,74	113,25	113,76	109,35	112,42	104,89	108,27
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	108,09	109,92	117,20	116,69	109,12	109,13	102,95
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	110,84	113,55	111,33	107,28	111,12	107,74	104,86
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	115,47	110,67	106,90	112,38	112,18	107,88	106,89
4.a. Bangunan	113,99	112,34	105,07	108,77	112,50	108,41	108,19
4.b. Non-Bangunan	118,15	107,75	110,22	118,64	111,67	107,04	104,79
5. Perubahan Inventori	215,04	43,47	314,06	69,11	286,76	87,66	99,02
6. Net Ekspor	-356,95	19,73	-967,70	181,78	-107,95	42,01	-4,57
6.a. Ekspor	117,11	108,17	86,57	187,38	96,18	100,41	113,41
6.b. Impor	118,35	107,47	85,04	187,47	99,45	99,40	112,55
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	111,27	111,20	111,27	110,68	108,05	108,74	108,10

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 8
Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Solok
2011 - 2017

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	103,67	104,18	104,63	104,00	104,33	104,63	105,18
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	101,02	103,31	103,42	103,01	104,26	104,27	104,96
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,08	102,81	106,28	103,18	103,84	105,06	105,97
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	104,83	104,38	109,21	109,38	104,21	103,72	103,99
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	102,84	104,22	104,09	103,45	103,30	105,78	105,47
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	106,07	104,83	104,35	104,40	104,64	106,00	106,67
1.f. Hotel dan Restoran	102,42	104,93	105,04	107,38	104,25	105,91	105,61
1.g. Lainnya	122,26	108,91	107,69	101,94	105,49	102,48	103,17
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	102,33	103,89	111,39	112,86	103,82	104,47	104,25
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	101,50	103,72	105,83	100,90	108,88	100,50	100,06
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	109,53	104,63	103,24	104,99	104,38	106,08	104,19
4.a. Bangunan	105,79	103,39	104,97	103,15	105,90	107,13	105,97
4.b. Non-Bangunan	116,28	106,67	100,48	108,06	101,98	104,35	101,18
5. Perubahan Inventori	192,69	36,78	240,60	74,72	388,33	98,50	100,20
6. Net Ekspor	-452,62	-211,26	177,32	176,56	106,30	121,78	126,06
6.a. Ekspor	110,54	114,40	87,21	154,35	100,40	101,41	105,77
6.b. Impor	112,02	110,96	85,39	153,42	100,12	100,37	104,51
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	104,40	106,43	105,63	105,79	105,44	105,31	105,33

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 9
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran
Kabupaten Solok
2010 - 2016

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	106,33	112,84	119,96	126,38	133,05	137,32	141,70
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	106,99	114,15	121,69	125,96	131,60	136,17	140,12
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	111,37	116,21	123,92	132,45	137,34	140,80	143,76
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	105,81	111,00	118,69	127,06	131,76	134,67	141,11
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	105,93	116,43	125,28	135,74	147,77	157,52	162,75
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	104,46	109,38	114,85	123,04	131,09	133,65	137,25
1.f. Hotel dan Restoran	112,57	121,10	129,18	136,02	143,56	149,05	153,51
1.g. Lainnya	102,03	106,10	112,08	120,23	128,13	131,14	137,62
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	105,62	111,75	117,58	121,58	127,79	133,49	131,82
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	109,20	119,55	125,75	133,70	136,46	146,28	153,30
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	105,43	111,31	115,46	123,59	132,82	135,07	138,57
4.a. Bangunan	107,75	117,08	117,18	123,58	131,28	132,84	135,62
4.b. Non-Bangunan	101,60	102,64	112,59	123,60	135,35	138,84	143,79
5. Perubahan Inventori	111,60	131,89	172,16	159,22	117,57	104,64	103,41
6. Net Ekspor Antar Daerah (6.a. - 6.b.)	78,86	-7,37	40,20	41,39	-42,03	-14,50	0,53
6.a. Ekspor	105,94	100,17	99,43	120,71	115,64	114,49	122,77
6.b. Impor	105,66	102,33	101,91	124,53	123,69	122,49	131,91
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	106,58	111,36	117,31	122,73	125,77	129,86	133,28

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 10
Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Menurut Pengeluaran
Kabupaten Solok
2011 - 2017

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,33	6,12	6,31	5,35	5,28	3,21	3,18
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,99	6,69	6,60	3,51	4,48	3,47	2,90
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	11,37	4,34	6,64	6,88	3,69	2,52	2,11
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,81	4,91	6,93	7,05	3,70	2,21	4,78
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,93	9,92	7,60	8,35	8,87	6,59	3,32
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,46	4,71	5,01	7,13	6,55	1,95	2,69
1.f. Hotel dan Restoran	12,57	7,58	6,67	5,29	5,54	3,82	2,99
1.g. Lainnya	2,03	3,98	5,64	7,27	6,57	2,36	4,94
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,62	5,80	5,22	3,40	5,11	4,46	-1,25
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,20	9,47	5,19	6,32	2,06	7,20	4,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,43	5,77	3,54	7,04	7,47	1,70	2,59
4.a. Bangunan	7,75	8,65	0,09	5,46	6,23	1,19	2,10
4.b. Non-Bangunan	1,60	1,02	9,70	9,78	9,50	2,58	3,56
5. Perubahan Inventori	11,60	18,18	30,53	-7,51	-26,16	-11,00	-1,17
6. Net Ekspor	-21,14	-109,34	-645,73	2,95	-201,55	-65,50	-103,62
6.a. Ekspor	5,94	-5,45	-0,73	21,40	-4,20	-0,99	7,23
6.b. Impor	5,66	-3,14	-0,41	22,19	-0,67	-0,97	7,69
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6,58	4,48	5,35	4,62	2,47	3,26	2,63

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA



<https://solokkab.bps.go.id>



- Badan Pusat Statistik. *Tabel Input Output Indonesia*. berbagai seri. Jakarta.
- _____. *Pendapatan Nasional Indonesia*. berbagai seri. Jakarta.
- _____. *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*. berbagai seri. Jakarta.
- _____. 1999. *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*. Jakarta.
- Frenken Jim. 1992. *How To Measure Tangible Capital Stocks*. Netherlands..
- Host Poul, Madsen, 1979 *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC.
- Keuning, J. Steven. 1988. *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*. Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta.
- _____. 1973. *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York,.
- _____. 1986. *Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods*, Series F No. 39, New York,.
- Verbiest Piet, 1997. *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Ward, Michael, 1976. *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris,.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://solokkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SOLOK**

Jalan Raya Solok Padang Km.20, Kayu Aro Kecamatan Gunung Teleng; Telp. (03755) 7334028;
E-mail: bps1303@bps.go.id Homepage: <http://solokkab.bps.go.id>

